

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2013). Menjaga APBN Agar Tetap Sustain. *Buletin Info Risiko Fiskal (IRF)*.
https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Menjaga_APBN_Agar_Tetap_Sustain.pdf
- Drieandita, K., & Santoso, D. B. (2023). Analisis Dampak Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 269–276.
<https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.04>
- Irawan, A., Nabila, H. S., Irawan, Y. M., & Fujilestari, N. A. (2024). Analisis Dampak APBN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(11), 121–127.
<https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/4132/3950>
- Maulida, R. (2018, September 28). *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Online Pajak.
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Universitas Indonesia.
- Mulyawan, W., & Alia, W. (2020). APBN dan Pendapatan Nasional. *Islamic Economics Journal*, 1, 59–67.
- Nugroho, S. D. A. (2009). *Cara Mudah Menghitung Pajak Pribadi: Praktis Mengisi SPT PPH 21 Dengan CD Program Aplikasi Kasus*. Raih Asa Sukses.
- Pardede, E., & Aribowo, I. (2021). Kajian Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Melalui e-System (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar). *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2), 174–179.
www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pub. L. No. 141/PMK.03/2015, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, Pub. L. No. 9/2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9 (2022).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (2022).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, Pub. L. No. 123/2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 349 (2015).
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supadmi, N. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*.
- Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pub. L. No. 36/2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133 (2008).
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia: Vol. Buku 1* (Budiarti, Ed.; Edisi ke-12, Buku 1). Salemba Empat. <https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=3982>